

PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I

TAHUN 2023



ESELON I

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**
Nama : Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, SH., MH
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Sugiyanto, S.H.

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, SH., MH

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan		
	2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%			
	3. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%			
	4. Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp6.776.392.000	
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%			
	2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	100%		Rp100.000.000	
	3. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%			
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	113 LHP			Rp5.062.796.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja	77 LHP			Rp3.555.954.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP			Rp430.346.000
	4. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHP		Rp618.250.000	
	5. Peningkatan Zona Integritas & SMAP	200 LHP		Rp6.200.000.000	
	6. Pemeriksaan Probitas Barang & Jasa	15 LHP		Rp250.000.000	
	7. Jumlah Quality Assurance yang terlaksana	1 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp409.000.000	
	8. Jumlah Consulting yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp100.000.000	
	9. LO (Liaison Officer) yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp100.000.000	

	10. Jumlah Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan		Rp650.000.000
	11. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 Kegiatan		Rp150.000.000
	12. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	1 Kegiatan		Rp650.000.000
	13. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	1 Kegiatan		Rp100.000.000
	14. Analisa Kebijakan & Administrasi Penanganan Pengaduan	8 LHP		Rp240.000.000
	15. Supervisi Pengawasan Wil. I – IV	38 LHP		Rp500.000.000

Jumlah Anggaran : **Rp25.892.738.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya